



Butuh Uluran Tangan Pemerintah Toko-toko di Malioboro Bertumbangan

YOGYA (KR) - Tidak kuat lagi menanggung beban operasional yang berat di masa pandemi Covid-19 ditambah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sudah berjalan lebih dari tiga minggu, toko-toko di kawasan Malioboro pun bertumbangan. Bahkan tidak kurang 10 toko terpaksa dijual pemiliknya untuk menutup utang yang menumpuk dan tak terbayar karena bisnis lumpuh.

"Banyaknya pemilik toko yang memilih menjual toko karena kehabisan modal untuk nombok di masa pandemi ditambah harus membayar bunga bank dan tidak mampu melunasi utang, serta beban-beban berat yang harus ditanggung pemilik toko seperti gaji karyawan, pajak-pajak, listrik, air dan lainnya," ucap Koordinator Lapangan Perkumpulan

Pengusaha Malioboro dan A Yani (PPMAY) KRT Karyanto Purbo Husodo kepada KR, Rabu (28/7) di tokonya, Jalan Malioboro Yogya.

Didampingi beberapa pengurus PPMAY lainnya, Karyanto berharap Gubernur DIY Sri Sultan HB X bisa membantu pihak toko-toko yang dalam kondisi saat ini semakin berat menjalani usahanya. "PPMAY dengan 220-an anggota pengusaha/pemilik toko sudah menjadi ikon Yogya dan sudah ada sejak lama membuka toko dan turut merintis Malioboro menjadi ikon wisata, saat ini benar-benar kolaps dan membutuhkan bantuan," tegas Karyanto menunjukkan beberapa plang "Toko Dijual" terpasang di beberapa toko legendaris dengan nomor ponsel yang bisa dihubungi.

Beban yang semakin berat ba-

gi kelangsungan hidup pemilik-pemilik toko di Jalan Malioboro dan A Yani juga menjadi gantungan hidup 9.850 orang staf/karyawan belum termasuk keluarga. "Kondisi saat ini banyak toko tutup, karyawan diliburkan, gaji karyawan hanya 25 persen saja," ucap Ketua Umum PPMAY Sadana Mulyono.

Pemilik Ramai Mall ini menyebutkan saat ini kondisi bisnis di Malioboro seakan mati. "Kita berharap kebijakan pemerintah supaya kami bisa bertahan, PPKM benar-benar membuat kita tidak bisa bergerak, efisiensi terpaksa dilakukan tapi tetap tidak bisa menutup biaya operasional yang tinggi," keluhnya.

Menanggapi kondisi para pelaku usaha di Malioboro ini, ekonom dari UMY, Ahmad Maruf mengharapkan agar program

baruitan sosial dan stimulus dari pemerintah untuk segera direalisasikan. Untuk bansos berupa subsidi upah kepada karyawan pertokoan dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta segera diwujudkan, yakni Rp 1 juta per karyawan. Bantuan tersebut dibutuhkan untuk menutupi pemotongan gaji karyawan. Bagi pengusaha, diharapkan mendapat bantuan berupa keringanan atau penghapusan pajak PPN. "Kebijakan tersebut memang dari pemerintah pusat. Untuk pemerintah daerah, diharapkan juga mengambil peran, seperti misalnya pembebasan pajak hotel dan restoran. Kebijakan ini akan meningkatkan daya saing hotel dan restoran meningkat. Selain itu, juga bisa menghapus pajak kendaraan bermotor (PKB)," ujar Maruf.

(Vin/Jon)-d



KRI-Surya Adi Lesmana

HARAPAN MASA PPKM: Pengunjung memilih busana di salah satu lapak pedagang kaki lima (PKL) Malioboro, Yogya, Rabu (28/7). Selain berharap adanya pemasukan di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, PKL mulai menggelar dagangannya agar barang tidak rusak lantaran hanya tersimpan di dalam gudang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005